

**Tata Kelola Pemerintahan Desa Gura Di Kabupaten Halmahera Utara Dalam Prespektif**

**Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa**



**Diajukan oleh :**


**Simon Kevin G Koloba**

**NPM : 140511723**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 18 Februari 2021**

.....  


**Dosen Pembimbing :**

**Dewi Krisna Hardjanti, S.H.,M.H.**

**Mengetahui**

**Dekan,**



**Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum.**

**Halaman Pengesahan Penulisan SKRIPSI**

**Tata Kelola Pemerintahan Desa Gura Di Kabupaten Halmahera Utara Dalam Prespektif**

**Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 25 Maret 2021**

**Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

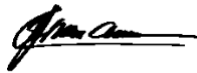
**Susunan Tim Penguji**

**Ketua : Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H.,M.Hum.**

**Sekretaris : Dewi Krisna Hardjanti, S.H.,M.H.**

**Anggota : Y. Hartono, S.H.,M.Hum.**

**Tanda Tangan**

.  ....  
.....  
.....  
.....

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.**

## **Halaman Persembahan**

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk:

1. Sujud syukur, ku sembahkan kepada'Mu ya Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat yang Engkau berikan sampai detik ini pada hidup ku, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua ku yang tercinta dan tersayang, Almahrumah Mama Hani Koloba Dan Ona Koloba kalian luar biasa.
3. Tete Josepus Koloba dan Nene Anthoneta Hangewa, terima kasih sudah bersusah payah membesarkan, merawat, membina dan mendidik serta tak bosan-bosannya berdo'a untuk keberhasilan anak mu ini.
4. Tua Eva Koloba, Tua Merry Koloba, Mama Jois Koloba, Mama Lin Koloba, Mama Uti Koloba, Paman Samuel Koloba, Kaka Dev Koloba, Kaka Eby Koloba, Kaka Sisilia Koloba, Cindy Siden, Kaka Stevan Tindage, Tua Datu Hangewa dan Mama Yerda Djawa, terima kasih atas doa dan dukungan baik moril maupun materil, kalian semua terbaik.
5. Adik-adik ku tercinta dan tersayang, Celine Tindage, April Koloba, Sofia Koloba, Jose Tindage, Gerti Koloba, Nono Tindage, Kristan Koloba, Deva Koloba dan Anthoneta Koloba.
6. Pacar Ku Tercinta dan Tersayang Sari Kakale.
7. Teman diskusi Rimayun Matippanna.
8. Sahabat-sahabat ku Feno Goboino, Sandy Djumoko, Zanda Duan, Nando Mulo, Fajar Lobiau, Angelbert Laimu, Nofis Salaka dan Nofriyan Aipipidely.
9. Bapak Dr. Hyronimus Rithi, S.H.,Lim. yang selalu memberi semangat dan motivasi.
10. Ibu Yustina Niken Sharaningtyas, S.H.,M.H. yang selalu membuka ruang diskusi.

11. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama Penulis belajar.
12. Bapak Rompis selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Halmahera Utara yang telah memberikan ijin penelitian.
13. Bapak Samuel Koloba, S.H., M.H. selaku Camat Tobelo yang telah memberikan ijin penelitian.
14. Bapak Jansen Hamarauku selaku Kepala Desa Gura di kabupaten Halmahera Utara.
15. Bung Juna Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), terima kasih telah memberikan buku-buku.
16. Mas Anto selaku senior Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.
17. Almamaterku Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
18. Dan yang terakhir untuk Bangsa dan Negara.

### **MOTO**

1. Hidup Sekali, Berarti, Lalu Mati
  2. Tidak ada kesulitan yang tidak dapat diatasi
  3. Mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. “Matius 7 Ayat 7”
  4. Lain pihak maju dan kau tertinggal, itu langkah yang tertunda bukanlah gagal.
- Yakini jalan tak kan pernah tertutup, cuma pekatnya uji buat pikir terkatup.
  - Saat nanti terbuka pasti kan jelas arah, karena usai gulita langit pasti akan cerah.

- Usaha yang terkerah kan terbayar pantas, indah hasil bila itu bukan jalan pintas.
- Jangan mudah tergiur untuk melenceng, jangan mundur oleh ujian yang menggembeleng.
- Kuatnya niatan jadikanlah tameng, saat ragu menyerbu semangat jadikan benteng.
- Kita dulu terlahir sebagai pemenang, dan kita harus mati sbagai juara yang di kenang.
- Dalam hidup jangan tampil sebagai pecundang, jangan pernah menyerah oleh tembok yang menghadang.
- Apapun yang terjadi, berjuanglah untuk masa depan mu.
- Bukan hanya percaya, namun bertindak dan berubahlah wujudkan semua.
- Jangan pernah ada kata yaasudahlah, itu cuman untuk jiwa raga yang telah kalah.
- Terus maju dan ubahlah cara yang salah, langkah mundur hanya untuk mereka yang menyerah.
- Kita hidup bukan untuk bergantung, yang tegarlah selalu yang kan beruntung.
- Semua sakit pasti kan ada ujung, maka yakin dari perih bahagia kan berkunjung.
- Jangan turunkan derajatmu ketika pasrah, senang adalah wujud dari usaha terkerah.
- Bukan bagi yang mundur dan mengalah, bukan bagi yang takut merasa telah lelah.
- Orang lain bukan penentu baiknya nasib mu, orang lain bukan yang benahi semua citamu.
- Dirimulah yang menentukan setiap langkah, jangan biarkan sikap pasrah bunuh impianmu yang megah.

"Lirik Lagu : Lanjtkanlah\_8 BALL"

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ku panjatkan kepada Tuhan Maha Esa yang telah memberikan anugerah-Nya sehingga dalam keadaan Pandemi Covid-19, Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada jenjang Strata (S-1). Judul dalam skripsi adalah **Tata Kelola Pemerintahan Desa Gura Di Kabupaten Halmahera Utara Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.**

Penulis yakin tidak semua langkah akan terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, Penulis mohon maaf apabila skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan, serta tidak menutup kemungkinan adanya saran, pendapat dan kritik membangun dari semua pihak demi untuk menyempurnakan skripsi ini. Ingin Penulis tuliskan panjang lebar tentang perjuangan Penulis hingga bisa sampai pada tahap ini, tapi takut yang lihat juga malas baca hehee. Intinya susah senang Penulis lewati dengan Riang Gembira.

Harapan Penulis, betapapun kecilnya karya ini, semoga dapat memberikan arti dan manfaat bagi semua yang membacanya. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Skripsi ini tidak mungkin bisa selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Univeristas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan juga selaku dosen penguji ke II.
4. Bapak Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji ke I.
5. Bapak Hartono, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji ke III..

Yogyakarta, 18 Februari 2021

**Simon Kevin G Koloba**

### **ABSTRAK**

Latar belakang mengenai tata kelola pemerintahan desa Gura masih terjadi kesenjangan antara hukum positif dan realita yang terjadi dalam hal tata kelola pemerintahan desa Gura. Untuk itu guna mengetahui tata kelola pemerintahan desa Gura secara keseluruhan, maka Penulis membuat penelitian dalam penulisan hukum ini dengan judul yaitu : Tata Kelola Pemerintahan Desa Gura Di Kabupaten Halmahera Utara Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan dalam penelitian ini yaitu menguraikan tentang apa yang hendak dicapai oleh Peneliti sehubungan dengan rumusan masalah, sedangkan penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini yaitu normatif. Kemudian dalam pembahasan berisi penjabaran mengenai hasil penelitian berdasar analisis data tentang penerapan dan kendala tata kelola pemerintahan desa Gura. Dan yang terakhir tentang kesimpulan yaitu, tata kelola pemerintahan desa Gura beberapa sudah dijalankan tetapi belum optimal, pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa Gura belum berjalan secara optimal karena minimnya pemahaman aparatur pemerintahan desa mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

***Kata Kunci : Tata Kelola, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa Gura.***

## ABSTRACT

The background regarding the governance of Gura village is that there is still a gap between positive law and the reality that occurs in terms of governance in the village of Gura. For this reason, in order to know the overall governance of Gura village, the author makes research in writing this law with the title: Governance of Gura Village in North Halmahera District in Perspective Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. The purpose of this research is to describe what the researcher wants to achieve in relation to the formulation of the problem, while the research carried out in this legal research is normative. Then the discussion contains an explanation of the results of the research based on data analysis about the implementation and constraints of governance in the village of Gura. And the last one regarding the conclusion, namely, the governance of Gura village has been implemented but has not been optimal, the implementation of Gura village governance has not been running optimally due to the lack of understanding of village government officials regarding Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa and the principles of good governance.

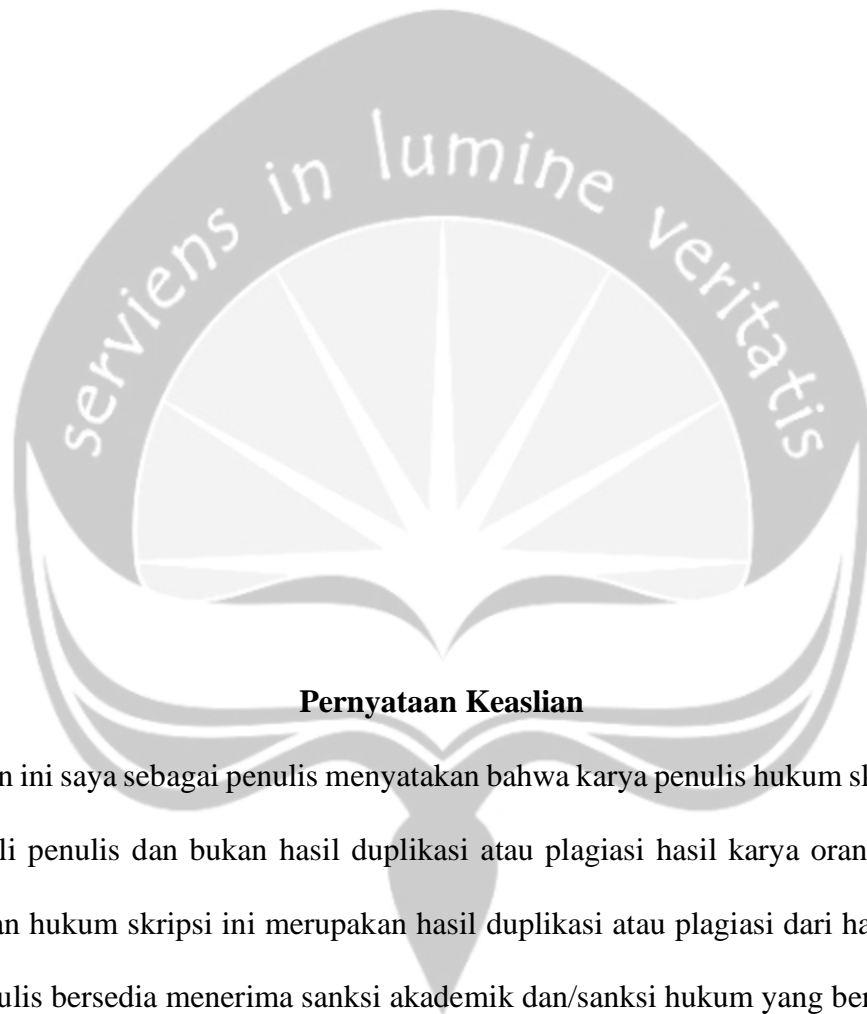
**Keywords :** *Governance, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Gura Village.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii



DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi .....	18
BAB II: PEMBAHASAN .....	20
A. Tinjauan Mengenai Ketentuan-Ketentuan Umum Tentang Tata Kelola, Pemerintahan, Pemerintah, Desa, Pemerintahan Desa, Dan Pemerintahan Desa Gura. ....	20
1. Tata Kelola.....	20
2. Pemerintahan.....	20
3. Pemerintah .....	31
4. Desa.....	34
5. Pemerintahan Desa.....	37
6. Pemerintahan Desa Gura.....	47
7. Sejarah Desa Gura.....	48
B. Tata Kelola Pemerintahan Desa Gura Di Kabupaten	



### **Pernyataan Keaslian**

Dengan ini saya sebagai penulis menyatakan bahwa karya penulis hukum skripsi ini adalah hasil karya asli penulis dan bukan hasil duplikasi atau plagiasi hasil karya orang lain. Apabila karya penulisan hukum skripsi ini merupakan hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil karya orang lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Februari 2021

Simon Kevin G Koloba

Halmahera Utara Dalam Prespekrif Undang-Undang	
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	50
C. Kendala Pengelolaan Tata Kelola Pemerintahan Desa	
Gura Di Kabupaten Halmahera Utara Dalam Prespektif	
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .....	65
1. Partisipasi.....	66
2. Transparansi.....	66
3. Koordinasi.....	68
BAB III: PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	73

### DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
A.1. Jenis Kelembagaan Desa Gura.....	46
A.2. Pembagian Wilayah Admnistrasi.....	47
B.3. Sarana Prasarana Desa Gura.....	52
B.4. Penduduk Menurut Umur Di Desa Gura.....	53
B.4. Tingkat Penduduk Masyarakat Desa Gura.....	54
B.5. Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	55



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setelah menempuh proses perjalanan sejarah yang panjang dalam perjuangan mencari jati diri bangsa, Indonesia telah menemukan kepribadian, pandangan hidup, ideologi bangsa, yang terangkum secara utuh di dalam Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Atas dasar itulah para Pendiri Bangsa memebentuk suatu Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintahan Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>2</sup> Ketentuan seperti itu menjadi tanggungjawab seluruh penyelenggara pemerintahan, seperti Presiden selaku Kepala Negara dan dibantu oleh Menteri-Menteri, kemudian Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa juga ikut berperan mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah ketika ditelah dari sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, dapat dikatakan bahwa Muh.Yamin-lah orang pertama yang membahas masalah pemerintahan daerah dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 dan pidatonya pada tanggal 11 Juli 1945.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pidato Mahasiswa Universitas Padjajaran Pada Final Kompetensi Debat Konstitusi Tahun 2016.

<sup>2</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Ni'Matul Huda, 2016, Hukum Tata Negara Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 301.

Secara konstitusional pengaturan mengenai pemerintahan daerah dicantumkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dalam perjalanan ketatanegaraan melahirkan Peraturan Perundang-Undangan tentang pemerintahan daerah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No.1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah
- 2) Undang-Undang No.2 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang No.1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah
- 5) Undang-Undang No.18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- 6) Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- 7) Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- 8) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 9) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Keberadaan Pemerintahan Daerah apabila ditinjau dari hukum positif dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Artinya Pemerintahan Daerah berada di bawah Pemerintahan Pusat yang memiliki wewenang sendiri. Dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah melihat peran pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu dibahas mengenai pemerintahan desa, sebab antara pemerintahan daerah dan pemerintahan desa memiliki hubungan vertikal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan setiap pemerintahan desa diharapkan dapat melakukan pengelolaan tata kelola desa yang baik, baik dari segi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini guna mewujudkan roda pemerintahan yang berjalan secara efektif.

Dasar hukum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara yuridis didasarkan pada pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan dapat menciptakan ladaan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Adapun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengartikan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pengaturan mengenai desa juga mengatur tentang para penyelenggara desa. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan, bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga menyebutkan, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Ketentuan mengenai desa tersebut bertujuan agar tata kelola desa berjalan dengan baik.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi partisipasi, transparansi, koordinasi dan akuntabilitas serta berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mencapai tata kelola pemerintahan desa yang baik harus dikuasai dan dipahami oleh penyelenggara desa, karena dengan menguasai dan memahami bagaimana tata kelola pemerintahan desa yang baik maka roda pemerintahan desa akan berjalan lebih efektif.

Desa Gura merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Tobelo, kabupaten Halmahera Utara, provinsi Maluku Utara yang tata kelola pemerintahan desanya secara normatif menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tesa. Desa Gura



dalam profilnya tercatat bahwa desa Gura merupakan desa tertua di Tobelo kabupaten Halmahera Utara. Terlepas dari aspek normatif dan aspek historis, desa Gura juga merupakan desa yang strategis karena keberadaan desa Gura berada di dalam pusat ibu kota kabupaten Halmahera Utara dan memiliki berbagai macam sumber ekonomi, baik pariwisata, pasar tradisional dan lain sebagainya. Hal ini apabila desa Gura dikelola dengan baik maka akan berdampak baik pula pada pembangunan desa dan dapat tercipta kesejahteraan bagi masyarakat desa.<sup>4</sup>

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa Gura di kecamatan Tobelo, kabupaten Halmahera Utara beberapa sudah berjalan tetapi belum optimal, seperti adanya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, pelaksanaan transparansi pemerintah desa tentang arah pembangunan desa lewat baliho yang di pasang di depan kantor desa, kemudian soal koordinasi internal dan eksternal antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa dan Pemerintah Daerah dalam hal ini dengan Camat dan Dinas Pembrdayaan Masyarakat dan Desa, dan yang terakhir soal akuntabilitas memang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Gura saat musyawarah desa Gura lewat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan lain-lain, akan tetapi pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa seperti itu menurut Penulis belum berjalan secara optimal. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui Tata Kelola Pemerintahan Desa Gura Di Kabupaten Halmahera Utara secara keseluruhan berdasarkan prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Penulis membuat judul penelitian hukum yaitu **“Tata Kelola Pemerintahan Desa Gura Di Kabupaten**

---

<sup>4</sup> Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Gura Kabpaten Halmahera Utara, Bab II, Tentang Profil Desa.

## **Halmahera Utara Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa''.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat rumusan masalah yang akan dibahas penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana tata kelola pemerintahan desa Gura dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?
2. Apa kendala pengelolaan tata kelola pemerintahan desa Gura dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata kelola pemerintahan desa Gura dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .
2. Untuk mengetahui kendala pengelolaan tata kelola pemerintahan desa Gura dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi mahasiswa tentang tata kelola pemerintahan desa, mengenai apa yang melatar belakangi tata kelola pemerintahan desa sehingga tata kelola pemerintahan sering tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tata kelola pemerintah desa, khususnya dalam melihat tata kelola pemerintahan desa Gura di kabupaten Halmahera Utara dalam prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul ” **Tata Kelola Pemerintahan Desa Gura Di Kabupaten Halmahera Utara Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**” adalah karya asli Penulis bukan hasil dari plagiasi dan dapat dipertanggung jawabkan oleh Penulis, karena dari judul yang diangkat penulis tidak ditemukan kesamaan dengan hasil penulisan hukum lain yang mengangkat judul yang berkaitan atau memiliki kesamaan dengan judul dan rumusan masalah yang sama dengan penulisan hukum/skripsi ini.

Adapun hal-hal yang membedakan skripsi ini dengan skripsi yang lain yaitu :

A. Judul : “Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Implementasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Di Desa Majangan Kec.Jrengki Kab Sampang)”. Yang ditulis oleh

Mellina Adhista Indriyani, NPM 20151005311067 Mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muahammadyah Malang

Rumusan masalah

- 1) Bagaimana implementasi tata kelola penyelenggaraan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Kepala Desa Majangan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
- 2) Bagaimana dampak dari implementasi tata kelola penyelenggaraan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Kepala Desa Majangan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang

Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui implementasi tata kelola penyelenggaraan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Kepala Desa Majangan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
- 2) Untuk mengetahui dampak dari implementasi tata kelola penyelenggaraan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Kepala Desa Majangan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

Perbedaan Penulisan hukum dengan judul skripsi ” Tata Kelola Pemerintahan Desa Gura Di Kabupaten Halmahera Utara Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan Judul skripsi : Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Implementasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Di Desa Majangan Kec.Jrengki Kab Sampang)”. Yang ditulis oleh Mellina Adhista Indriyani, NPM 20151005311067 Mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang, terlepas dari perbedaan judul, rumusan masalah dan penelitian, terdapat juga perbedaan pada lokasi penelitian.

B. Judul : Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY yang ditulis oleh : Hasan B Mukat, NPM 08521926 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Rumusan Masalah

1) Bagaimana Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY ?

Tujuan Penelitian

1) Untuk mendeskripsikan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY.

Perbedaan Penulisan hukum dengan judul ” Tata Kelola Pemerintahan Desa Gura Di Kabupaten Halmahera Utara Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” dan penulisan hukum dengan judul skripsi : Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY, yang ditulis oleh : Hasan B Mukat, NPM 08521926 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan

Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, terlepas dari perbedaan judul, rumusan masalah dan tujuan penelitian terdapat juga perbedaan pada lokasi penelitian.

- 2) C. Judul : Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Rantau Suli Jangkat Timur Kabupaten Merangin. Yang ditulis oleh Buja Mardono, NPM : 151945, Mahasiswa Fakultas Syari’Ah Universitas Islam Negeri Sultan Tahaha Saifudin Jambi.

Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa Rantau Suli pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa ?
- 2) Bagaimana proses penyusunan perencanaan pembangunan desa Rantau Suli pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa ?
- 3) Apa saja kendala pemerintah desa Rantau Suli dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan perencanaan pembangunan pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa ?

Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan desa Rantau Suli pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Untuk mengetahui proses penyusunan perencanaan pembangunan desa Rantau Suli pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah desa Rantau Suli dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan perencanaan pembangunan pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di desa Rantau Suli kecamatan Jangkat Timur kabupaten Merangin.

Perbedaan Penulisan hukum dengan judul ” Tata Kelola Pemerintahan Desa Gura Di Kabupaten Halmahera Utara Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan judul skripsi : Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Undang-Undang Nomot 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Rantau Suli Jangkat Timur Kabupaten Merangin. Yang ditulis oleh Buja Mardono, NPM : 151945, Mahasiswa Fakultas Syari’Ah Universitas Islam Negeri Sultan Tahaha Saifudin Jambi, terlepas dari perbedaan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, terdapat juga perbedaan pada lokasi penelitian.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

##### **a. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

Tata kelola pemerintahan yang baik meskipun belum ada yang mendefinisikannya secara formal, namun tata kelola pemerintahan dianggap penting untuk menjamin kesejahteraan nasional. Tata kelola pemerintahan yang baik, atau dapat disebut good governance menurut kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab negara. Berdasarkan uraian tersebut, setidaknya good governance memiliki beberapa indikator pengukuran. Diantara indikator tersebut adalah:

##### **1. Transparansi**

Transparansi merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini.

## 2.Partisipasi

Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

## 3.Koordinasi

Koordinasi adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu.<sup>5</sup>

## 4.Akuntabilitas

---

<sup>5</sup> <https://blog.gamatechno.com/4-indikator-penting-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik/>, diakses



Akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji seberapa kredibel suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. Akuntabilitas akan melewati beberapa proses pengujian tertentu. Proses yang terstruktur ini diharapkan akan mampu membaca celah-celah kekeliruan, seperti penyimpangan anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat. Mekanisme akuntabilitas juga memberikan kesempatan kepada para pemangku kebijakan untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu.

b. Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

c. Desa Gura

Desa Gura merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Tobelo, kabupaten Halmahera Utara, provinsi Maluku Utara yang tata kelola pemerintahan desanya secara normatif menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Deas Gura dalam profilnya tercatat bahwa desa Gura merupakan desa

---

<sup>6</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

tertua di Tobelo kabupaten Halmahera Utara. Terlepas dari aspek normatif dan aspek historis, desa Gura juga merupakan desa yang strategis, karena keberadaan desa Gura berada di dalam pusat ibu kota kabupaten Halmahera Utara dan memiliki berbagai macam sumber ekonomi, baik pariwisata, pasar tradisional dan lain sebagainya. Hal ini apabila desa Gura di kelola dengan baik maka akan berdampak baik pula pada pembangunan desa dan dapat tercipta kesejahteraan bagi masyarakat desa.

d. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebabkan dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, untuk itu Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang, maka lahirlah Undang-Undang tersebut.<sup>7</sup>

Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan

---

<sup>7</sup> Konsideran, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.<sup>8</sup>

#### G. Batasan Konsep

##### a. Tata Kelola

Berbicara mengenai tata kelola terdapat dua kata di dalamnya, yang pertama terdapat kata tata. Menurut KBBI kata tata artinya aturan, sedangkan kata kelola menurut KBBI adalah mengendalikan atau menyelenggarakan. Sehingga mengartikan tata kelola ketika pendekatannya menggunakan kedua pengertian tersebut, maka tata kelola dapat diartikan sebagai mengendalikan atau menyelenggarakan aturan.

##### b. Pemerintahan

Di lingkungan Ahli Hukum Tata Negara pemahaman mengenai kata “Pemerintahan” masih belum ada kesepahaman yang sama. Hal ini disebabkan oleh adanya cara pandang yang berbeda dalam memberikan arti dari Pemerintahan itu. Dalam bukunya Hestu Cipto Handoyo Dosen saya di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta memberi arti Pemerintahan itu terbagi dua, yaitu arti luas dan arti sempit.

---

<sup>8</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan pengertian Pemerintahan dalam arti sempit adalah kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh eksekutif saja. Bertitik tolak dari dua pengertian tersebut, jika pembahasannya mengenai Pemerintahan Negara maka yang dimaksud Pemerintahan Negara adalah suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari organ-organ pemegang kekuasaan di dalam negara dan saling melakukan hubungan fungsional diantara organ-organ tersebut baik secara horizontal maupun vertical untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.<sup>9</sup>

c. Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>10</sup>

d. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> B Hestu Cipto Handoyo, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 118.

<sup>10</sup> Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>11</sup> Ibid.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan.<sup>12</sup>

### 2. Sumber data

1. Bahan hukum primer dari penelitian hukum ini adalah peraturan perundang – undangan dalam hal ini yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- c) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. Bahan hukum sekunder berupa asas - asas hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, website.

### 3. Cara pengumpulan data

- a. Wawancara dengan Bapak Jansen A Hmarauku selaku Kepala Desa, Bapak Samuel Koloba selaku Camat Tobelo dan Bapak Wenas Rompis selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Dan Masyarakat.
- b. Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang diambil dari peraturan perundang undangan ,buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pusataka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

#### 4. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan data baik dari hasil wawancara dengan narasumber maupun dari hasil kepustakaan yang kemudian dihubungkan dengan teori kebenarannya.

#### 5. Proses berpikir

Dalam penelitian ini menggunakan pola berpikir deduktif yaitu bertolak dari hal – hal umum kemudian menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini dapat dilihat pada latar belakang masalah.<sup>13</sup>

### I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan skripsi ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

#### BAB II : PEMBAHASAN

Bab II berisi pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan desa Gura di kabupaten Halmahera Utara dalam prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>13</sup> <https://www.google.com/amp/s/hasanaguero.wordpress.com/2012/05/14berpikir-induktif-dan-deduktif/amp/>, diakses 31 Oktober 2020, Pukul 09. 05 WIT.

### BAB III : PENUTUP

Bab III berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan berisi saran dari Penulis, guna memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terlebih khusus dalam bidang ilmu hukum kenegaraan dan pemerintahan tentang tata kelola pemerintahan desa.



## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa :

- 1) Tata kelola pemerintahan desa Gura beberapa sudah dijalankan tetapi belum optimal, yaitu sebagai berikut :
  - a. Partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan menyepakati hal strategis tentang desa terlalu nepotisme, karena keterlibatan unsur masyarakat masih bersifat pendekatan emosional.
  - b. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Gura tentang hal-hal mengenai pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan hanya dapat diakses oleh sebagian masyarakat sebab pemberitahuan informasi hanya menggunakan system informasi tradisional tanpa pengembangan system informasi modern.
  - c. Koordinasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan hanya dengan beberapa instansi daerah, seperti berkoordinasi dengan Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mestinya koordinasi yang dilakukan lebih luas, seperti berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk bagaimana memsosialisasikan tentang pencegahan Covid-19, berkoordinasi dengan anggota Dewan yang berada di dapil desa Gura untuk mengadakan Reses guna menampung aspirasi desa dan lain sebagainya.



- d. Akuntabilitas telah diterapkan oleh pemerintah desa saat pelaksanaan musyawarah desa Gura lewat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan lain-lain pada saat pelaksanaan musyawarah desa Gura. Akan tetapi pelaksanaan prinsip akuntabilitas belum didorong oleh pengembangan informasi moderen, sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk mengakses informasi tentang desa karena tidak semua masyarakat mengetahui informasi tentang desa, sehingga fungsi kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan secara efektif.
- 2) Pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa seperti kesimpulan pertama tentu belum sesuai dengan yang diharapkan, artinya tata kelola pemerintahan desa Gura belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa Gura belum berjalan secara optimal karena aparatur pemerintah desa Gura tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka Penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Aparatur pemerintah desa harus diisi oleh orang-orang yang paham tentang Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, agar aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya dapat sesuai dengan bidang tugas atau tupoksinya

masing-masing. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

- 2) Aparatur pemerintah desa perlu diberikan pemahaman dan pembinaan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu mendorong hal ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Cipto Handoyo, Hestu, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Cipto Handoyo, Hestu, 2020, *Demokrasi Desentralistik dalam BELENGGU BIKAMERAL SEMU*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fajar Nur Dewanta, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta.
- Huda, Ni'Matul, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kusnardi, Moh dan Bintan R Saragih, 2008, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Marbun dan Mafud MD, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Palupi, Sri Ulfi Ulfiah, Prasetyohadi, Yulia Sri Sukapati, Sabik Al Fauszi, 2016, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, Lakspesdam PBNU, Jakarta.
- Sarja, 2016, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.
- Wasisto, Sadu dan M, Irwan Tahir, 2006, *Prosfek Pembangunan Desa*, Fokusmedia, Bandung.
- Zamroni, Sujani, M Zainal Anwar, Sugeng Yulianto Abdur Rozaki, Ashari Cahyo Edi, 2015, *Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan*, Institute For Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara Jakarta.

### **Hasil Penelitian**

Meilina Adhista Indriyani, 2019, *Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang.

Hasan Mukat, 2016, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

### **Jurnal**

Cora Elly Novianti, 2013, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10/No-02/Juni/2013, Pusat Kajian Konstitusi.

*Sugiman, 2018, Pemerintahan Desa,*  
<https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>, Binamuliahukum.

### **Website**

<https://blog.gamatechno.com/4-indikator-penting-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik/>, diakses 23 Oktober 2020.

<https://kbbi.web.id/kelola>, diakses 27 Oktober 2020.

<https://www.google.com/amp/s/hasanaguero.wordpress.com/2012/05/14berpikir-induktif-dan-deduktif/amp/>,

<https://pelayananpublik.id/2020/06/15/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan-tugas-fungsi-hingga-jenisnya/>, diakses 15 September 2020.

<https://kbbi.web.id/pemerintah>

<https://pemerintah.net/arti-pemerintah/>, diakses 12 Oktober 2020.

<https://pemerintah.net/fungsi-pemerintah/>, diakses 22 Oktober 2020

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/09/pengertian-desa.html>, diakses 31 Oktober 2020.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Gura Kabupaten Halmahera Utara, *Tentang Profil Desa*.

Pidato Mahasiswa Universitas Padjajaran, *Final Kompetensi Debat Konstitusi* Tahun 2016.

